

## Selama 2025, Prabowo Sudah Kucurkan Bansos Rp101,1 T

Jakarta, MIMBAR -- Presiden Prabowo Subianto telah mengucurkan bantuan sosial (bansos) Rp101,1 triliun sejak 1 Januari hingga akhir Agustus 2025.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan jumlah belanja bansos tersebut naik 5,5 persen dibandingkan Agustus 2024. Saat itu, anggaran bansos terealisasi Rp95,9 triliun.

"Belanja bantuan sosial lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Tahun ini Rp101,1 triliun, 5,5 persen lebih tinggi," ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Agustus 2025, Senin (22/9).

Belanja bansos ini terealisasi untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) sebesar Rp30,9 triliun kepada 96,7 juta peserta. Lalu, kartu sembako Rp34,4 triliun untuk 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

■ Bersambung ke Hal 11



## Respon LIPPSU Terkait Temuan BPK Rp4,4 Miliar Kejatisu Didesak Periksa Sekretaris DPRD Medan

Medan, MIMBAR -- Polemik kelebihan bayar anggaran perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Kota Medan terus menjadi sorotan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APBD 2023 mengungkap adanya dugaan kelebihan pembayaran senilai Rp4,4 miliar.

Temuan ini menuai reaksi keras dari berbagai kalangan, salah satunya dari



■ Bersambung ke Hal 11



## Menaker Ungkap Nasib Kenaikan UMP 2026

Jakarta, MIMBAR - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan nasib upah minimum provinsi (UMP) 2026 saat para buruh melakukan demonstrasi di DPR RI.

"Kita sedang kaji (besaran UMP 2026), kita masih punya waktu," kata Yassierli usai Rapat Koordinasi di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (22/9).

"Nanti akan ada aturan terkait UMP 2026, insyaallah. Pengumumannya nanti kan November (2025), kita punya waktu nanti," tegas sang menteri.

Yassierli berjanji mendengarkan aspirasi dari buruh terkait tuntutan kenaikan UMP 2026. Ia menegaskan hal tersebut memang menjadi fase yang harus ditempuh sebelum memutuskan upah minimum.

Di lain sisi, pemerintah mengklaim bakal mendengar aspirasi dari para pengusaha.

"Dan kita punya lembaga, LKS Tripartit Nasional. Nanti dikaji di sana dan tentu nanti kita juga akan bahas semua masukan-masukan di situ," tandasnya.

■ Bersambung ke Hal 11

**Jadwal Salat**

30 RABI'UL AWAL 1447 H

Imsak : 04:50 WIB	Ashar : 15:26 WIB
Subuh : 05:00 WIB	Maghrib : 18:23 WIB
Zuhur : 12:20 WIB	Isya : 19:32 WIB

■ Untuk kota Medan sekitarnya

## Hidayah Sikat Rokok Ilegal

Oleh Dr. A. Rasyid, MA

Pernyataan tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tentang pemberantasan rokok ilegal patut diapresiasi. Ia tidak segan menindak siapapun yang terlibat, termasuk oknum di lingkungan Kementerian Keuangan dan Bea Cukai. Retorika keras ini penting, sebab publik sudah terlalu lama skeptis bahwa peredaran rokok ilegal hanyalah "mainan" mafia besar yang dilindungi oknum aparat.

Namun, persoalannya bukan sekadar janji, melainkan konsistensi. Target "tiga bulan hilang" yang disampaikan Purbaya menjadi semacam tenggat moral bagi pemerintah.



■ Bersambung ke Hal 11

# Soal Peredaran Rokok Ilegal Purbaya Ancam Sikat Oknum Bea Cukai

Jakarta, MIMBAR - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berjanji akan membereskan peredaran rokok ilegal yang menghambat pendapatan negara melalui cukai.

Purbaya menyatakan, dirinya tidak segan menindak orang-orang yang terlibat. Ia pun tak menutup kemungkinan menindak anak buahnya sendiri bila terlibat.

"Yang terlibat kita akan sikat, termasuk kalau ada yang terlibat dari Bea Cukai dan Departemen Keuangan. Saya harap dengan itu nanti tiga bulan ke depan sudah hilang," ujar Purbaya pada jumpa pers APBN Kita September 2025 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/9).

Purbaya mengaku sudah mengundang sejumlah perwakilan marketplace. Ia meminta para penyedia platform perdagangan online untuk melarang penjualan rokok ilegal dan barang palsu lainnya.

Ia juga akan menugaskan penindakan terhadap pihak-pihak yang masih menjual rokok ilegal. Selain menekan pelanggaran hukum, Purbaya berharap kebijakan ini bisa menekan konsumsi rokok ilegal. "Kan sudah ke-detect siapa-siapa aja yang jual, akan kita mulai tangkep,

■ Bersambung ke Hal 11



## Transportasi Baru di Danau Toba Bobby Nasution Jajal Pesawat Amfibi

Samosir, MIMBAR - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mencoba penerbangan perdana pesawat Amfibi atau Seaplane dari Bandara Silangit, kemudian mendarat di Pelabuhan Mariana Resort, Danau Toba. Transportasi baru di Danau Toba ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, pariwisata, dan

■ Bersambung ke Hal 11



## Anggota DPR Pertanyakan Istilah 'Ibu Kota Politik' IKN

Jakarta, MIMBAR - Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin mempertanyakan frasa 'Ibu Kota Politik' dalam Perpres No 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah terkait rencana pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

"Di UU IKN spirit yang kita tangkap

■ Bersambung ke Hal 11



■ Gas terus Cowboy ....!  
■ He..he..he..

## Sidang Gugatan Ijazah Gibran di PN Jakpus Lanjut ke Mediasi

Jakarta, MIMBAR - Sidang gugatan perdata sebesar Rp125 triliun terhadap Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berlanjut ke tahap mediasi.

Ketua Majelis Hakim Budi Prayitno menjelaskan proses mediasi ini merupakan tahapan yang harus ditempuh dalam perkara perdata.

Ia mengatakan upaya mediasi dilakukan sebelum nantinya masuk proses pembuktian. Dalam proses mediasi itu, dirinya juga menunjuk Sunoto sebagai Hakim Mediator.

"Nanti akan dipandu seorang mediator. Kemudian (mediasi) waktu 30 hari. Silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya," ujarnya dalam persidangan di PN Jakpus, Senin (22/9).

■ Bersambung ke Hal 11



## Tiga Mimpi Bupati Deli Serdang Rakyatnya Sehat, Kenyang, dan Bersekolah

Oleh: Ngatirin

ADA satu kalimat jujur keluar dari mulut Bupati Deli Serdang, dr. Asri Ludin Tambunan, ketika singgah ke kantor Mimbar Umum. Katanya, ia tidak ingin menjadikan Deli Serdang tetiba berubah menjadi kota canggih, kota modern, apalagi kota industri yang penuh penciri-

taan. Ia hanya ingin warganya sehat, kenyang, dan bersekolah.

Tiga janji itu sederhana. Tidak muluk-muluk. Rakyat pun sebenarnya tidak pernah menuntut jalan tol di depan rumah, tidak juga gedung pencakar langit menjulang di atas tanah mereka. Yang rakyat

■ Bersambung ke Hal 11

